

SKRIPSI

***COLLABORATIVE DYNAMICS* DALAM PENANGANAN
STUNTING MELALUI PROGRAM MA'SILAMBI DI DESA
DUAMPANUA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NURMADINA JAMHUR

E011201016



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

202



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRAK

NURMADINA JAMHUR. *Collaborative Dynamics* dalam Penanganan *Stunting* Melalui Program Ma'silambi Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar (dibimbing oleh Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP dan Rizal Pauzi, S.Sos.,M.Si.)

Program ma'silambi merupakan inovasi penanganan *Stunting* Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dengan kolaborasi di tingkat Desa, yang bertujuan untuk menangani munculnya kasus *stunting* baru sebagai salah satu daerah dengan prevalensi *stunting* tertinggi. Kegiatan dilakukan untuk memberikan penyuluhan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program yang ada di desa. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi angka *stunting* di Indonesia salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative Dynamics* dalam penanganan *Stunting* pada program Ma'silambi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan *stakeholder* yang terlibat dalam Forum Ma'silambi. Fokus penelitian menggunakan teori *Collaborative Dynamics* menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) yaitu *Principled Engagement*, *Shared Motivation* dan *Capacity for Joint Action*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan *stunting* baru melalui Program Ma'silambi di Desa Duampanua, dari ketiga indikator *Collaborative Dynamics* yang dilakukan dinilai masih kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan *principled engagement*, *shared motivation* dan *capacity for joint action* dalam kolaborasi masih perlu diperbaiki karena memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya monitoring oleh pemerintah, kurangnya komitmen masing-masing aktor dalam berkolaborasi, dan kurangnya kapabilitas dari pelaksana serta tidak adanya aturan khusus dari Program Ma'silambi.

Kata Kunci: kolaborasi; penanganan *stunting*; ma'silambi



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRACK

NURMADINA JAMHUR. Collaborative Dynamics in Handling *Stunting* Through the Ma'silambi Program in Duampanua Village, Polewali Mandar Regency (supervised by Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP and Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si.)

The ma'silambi program is an innovation in handling *stunting* from the West Sulawesi Provincial Health Service with collaboration at the village level, which aims to handle the emergence of new *Stunting* cases in one of the areas with the highest prevalence of *stunting*. Activities are carried out to provide education and increase community participation in existing programs in the village. This is the government's effort to reduce *stunting* rates in Indonesia, such as in West Sulawesi Province, specifically in Duampanua Village, Polewali Mandar Regency. This research aims to describe and analyze Collaborative Dynamics in handling *Stunting* in the Ma'silambi program. The research method uses a qualitative approach with a case study method, data collection techniques through observation, interviews and documentation with *stakeholders* involved in the Ma'silambi Forum. The research focus uses the Collaborative Dynamics theory according to Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), namely Principled Engagement, Shared Motivation and Capacity for Joint Action.

The results of the research show that in handling new *Stunting* through the Ma'silambi Program in Duampanua Village, the three Dynamics Collaboration indicators carried out are considered less than optimal. This is because principled engagement, shared motivation and capacity for joint action in collaboration still need to be improved because they have several obstacles, namely lack of monitoring by the government, lack of commitment by each actor in collaborating, and lack of capability from implementers and the Ma'silambi Program.

Keywords: collaboration; handling *stunting*; ma'silambi



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmadina Jamhur

NIM : E011201016

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Collaborative Dynamic* dalam Penanganan *Stunting* Melalui Program Ma'silambi di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 24 April 2024

Yang menyatakan,

Nurmadina Jamhur



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurmadina Jamhur
Nim : E011201016
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : *Collaborative Dynamic* dalam Penanganan *Stunting* Melalui Program Ma'silambi di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP
NIP 197205072 00212 1 001

Pembimbing II

Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si.

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,

Prof. Dr. Alwi, M.Si

NIP 19631015 198903 1 006



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurmadina Jamhur
NIM : E011201016
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : *Collaborative Dynamic* dalam Penanganan *Stunting* Melalui Program Ma'silambi di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Maret 2024

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP

Sekretaris : Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si

Anggota : 1. Drs. Nelman Edy, M.Si

2. Irma Aryanti Arif, S.Sos., M.Si

()
()
()
()

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah *Subhana Waa Ta'aala* atas nikmat karunia-Nya serta kemudahan dan kebaikan yang tak terhingga diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Collaborative Dynamics Dalam Penanganan Stunting Melalui Program Ma’silambi Di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar**” dengan sebaik-baiknya. Penulis juga haturkan shalawat dan salam kepada rahmat pemuka alam, idola seluruh umat muslim, sang pahlawan revolusi islam yakni Nabi kita Rasulullah Muhammad saw.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Penulis telah berusaha memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan senang hati penulis menerima segala saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan kedepannya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi. Maka dari itu, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Djamhur** dan Ibu **Nurlina** yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya diberikan sehingga mengantarkan penulis untuk menyelesaikan penelitiain ini demi mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih juga kepada **Kakak** tercinta penulis yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis, dan juga kepada semua **Keponakan** penulis yang mendoakan dan menghibur selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin sekaligus dosen penasehat akademik dan pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan kepada penulis meskipun ditengah kesibukannya. Penulis sangat berterima kasih dan mendoakan agar beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.

5. **Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si.** selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, masukan, motivasi, serta meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis dari awal penyusunan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih dan mendoakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. **Drs. Nelman Edy, M.Si.** dan **Irma Aryanti Arif, S. Sos., M. Si.** selaku dewan penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima kasih atas segala masukan dan kritikan yang sangat membangun guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. **Para Dosen Departemen** Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala didikan ilmu dan motivasi yang diberikan dan semoga apa yang telah penulis peroleh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
8. **Seluruh Staff Departemen** Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Pak A. Revi, Pak Lili dan Ibu Cia) serta Staff di Lingkungan FISIP Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali terima kasih atas segala bantuan yang diberikan bagi penulis selama ini.
9. Terima kasih kepada seluruh **Informan dan Staff Desa Duampanua** yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh data dan informasi terkait penelitian ini dan telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh **Staff Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar** atas ilmu, pengalaman dan pelatihan yang diberikan kepada penulis untuk

mengasah hardskill maupun softskill penulis selama mengikuti program Magang Mandiri dan telah memberikan pengalaman dalam dunia kerja.

11. Terima kasih kepada teman-teman **PENA 2020** yang selalu memberikan semangat, motivasi, selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa. Sukses selalu untuk teman-teman PENA dan semoga kebersamaan yang terjalin tetap ada hingga dapat meraih cita untuk goreskan sejarah.
12. Terima kasih kepada **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar banyak pengetahuan dan pengalaman.
13. Terima kasih kepada keluarga besar **UKM LDM Ibnu Khaldun FISIP UNHAS** yang telah memberikan penulis tempat untuk belajar dan memperoleh banyak pengalaman. Terima kasih atas segala bimbingan dan kekeluargaan yang diberikan.
14. Terima kasih kepada teman-teman **KKN Gel.110 Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar** yang telah memberikan pengalaman dan kenangan selama mengabdikan diri di Desa Bonne-Bonne.
15. Terima kasih kepada **Uswatun** yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam penelitian.
16. Terima kasih kepada **Kost Lisyaf** (Lisa Syarif, Nurfadilla, Evi, dan Cila) selalu menyemangati dan memberikan dukungan.
17. Terima kasih kepada **Teman Kamar** (Nurfadilla dan Evi) selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita, dan berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir, sukses untuk kita.

18. Terima kasih juga kepada **Sektor Sahabat** (Sepia, Nurcholiza, Andini, Ummul, Huda, Maycela, dan Firna) telah menemani, dan memberikan semangat selama awal perkuliahan hingga saat ini.
19. Terima kasih kepada **Sektor Tallasa** Dilla dan Ismi telah membantu dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini
20. Terima kasih juga kepada **Teman-teman dan kakak** (Nantasya, Tenri, Kiki, Fira, Emi, Rani, Nurul dan Fadina selalu memberikan semangat bagi penulis dan memberikan pengetahuan, sukses selalu untuk kita semua.
21. Terima kasih kepada **sahabat** penulis Musdalifa, Nur Arafah dan Uswatun Khasanah selalu menjadi tempat penulis bercerita, memberikan semangat dan dukungan bagi penulis. Sukses untuk kita
22. Terima kasih kepada seluruh **Keluarga dan Kerabat** penulis yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan yang terbaik selama penulis berada di bangku perkuliahan.
23. Terima kasih kepada **Semua Pihak** yang telah terlibat aktif atau berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
24. *Great appreciation to myself for having been responsible for completing this skripsi. Thank you for continuing to try and not giving up and always enjoying the process for what your aspire to.*

Makassar, 26 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iiiv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 <i>Governance</i>	14
2.2 <i>Collaborative Governance</i>	14
2.2.1 Definisi <i>Collaborative</i>	14
2.2.2 Definisi <i>Colaborative Governance</i>	17
2.2.3 Teori <i>Collaborative Governance</i>	18
2.3 Konsep <i>Stunting</i>	29
2.3.1 Definisi <i>Stunting</i>	29
2.3.2 Penyebab <i>Stunting</i>	30
2.3.3 Proses Terjadinya <i>Stunting</i>	32
2.3.3 Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	35
2.4 Kebijakan Penanganan <i>Stunting</i> di Desa	36
2.5 Program Ma'Silambi	38

2.6 Penelitian Terdahulu.....	41
2.7 Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Waktu Penelitian.....	48
3.4 Fokus Penelitian	48
3.5 Informan Penelitian.....	49
3.6 Sumber Data	50
3.7 Teknik Pengumpulan Data	51
3.8 Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Desa Duampanua.....	55
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Duampanua.....	55
4.1.2 Kondisi Demografis Desa Duampanua.....	60
4.1.3 Visi Misi Desa Duampanua.....	60
4.1.4 Struktur Organisasi Desa Duampanua	61
4.1.5 Program Penanganan <i>Stunting</i> di Desa Duampanua.....	62
4.2 <i>Collaborative Dynamics Stakeholder</i> dalam Penanganan <i>Stunting</i> melalui Program Ma'silambi	63
4.2.1 Prinsip Keterlibatan (<i>Principle Engagment</i>)	65
4.2.2 Motivasi Bersama (<i>Shared Motivation</i>).....	74
4.2.3 Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama (<i>Capacity For Join Action</i>).....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Prevalensi <i>Stunting</i> Kec. Anreapi.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	50
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	56
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan masyarakat desa Duampanua.....	57
Tabel 4.3 Data Pengurus Forum Ma'silambi.....	68
Tabel 4.4 <i>Principled Egagement</i>	74
Tabel 4.5 <i>Shared Motivation</i>	84
Tabel 4.6 Tingkat Partisipasi Balita ke Posyandu di Desa Duampanua.....	90
Tabel 4.7 <i>Capacity for joint action</i>	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Angka Prevalensi <i>Stunting</i> Berdasarkan Provinsi.....	3
Gambar 1.2 Pravalensi <i>Stunting</i> Berdasarkan Provinsi /Kota Sulawesi Barat.....	4
Gambar 1.3 Jumlah <i>Stunting</i> Di Desa Duampanua.....	9
Gambar 2.1 Kerangka Kerja Interative Tata Kelola Kolaboratif.....	22
Gambar 2.2 Siklus <i>Stunting</i>	32
Gambar 2.3 Proses dan Pencegahan <i>Stunting</i>	34
Gambar 2.4 Kerangka Pikir	46
Gambar 2.5 <i>Collaborative Dynamics</i>	48
Gambar 4.1 Jumlah Keluarga Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan Kesehatan Balita Di Desa Duampanua.....	59
Gambar 4.2 Jumlah Balita <i>Stunting</i> Desa Duampanua.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Stunting merupakan salah satu masalah yang timbul dari *double burden malnutrition* (DBM) akibat dari gagal tumbuh kembang pada anak yang berdampak buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang yang memiliki resiko kesakitan dan kematian yang cukup besar. (Sumarwanto, 2021). *Stunting* adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, yang umumnya dikarenakan asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan ini terjadi sejak mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. (Kementerian Kesehatan, 2018).

Kondisi anak yang tergolong *Stunting* ini dapat dilihat pada panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari standar nasional yang dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pada jangka pendek, *stunting* menyebabkan gangguan perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme tubuh. Sedangkan untuk jangka panjang menyebabkan penurunan kemampuan kognitif anak, kesulitan belajar, imunitas tubuh rendah sehingga berisiko tinggi munculnya penyakit degenerative/metabolism. Balita yang mengalami

stunting ketika ia tumbuh dewasa akan memiliki tubuh yang pendek dengan produktivitas rendah dan tidak mampu berdaya saing (BKKBN, 2021).

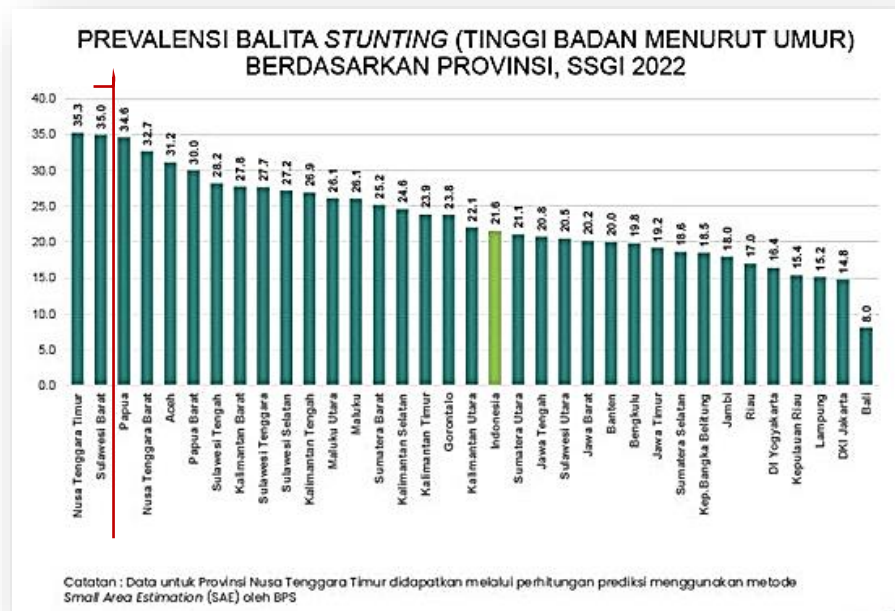
Permasalahan *Stunting* saat ini menjadi masalah besar secara global berdasarkan data UNICEF dan WHO tahun 2020 angka *Stunting* di Indonesia menempati urutan tertinggi ke 115 dari 151 Negara dan berada di urutan ke-2 di Asia tenggara. Kasus *Stunting* di Indonesia mencapai angka 21,6% walaupun angka tersebut menurun pada tahun sebelumnya yaitu 24,4 % prevelensi *Stunting* di Indonesia masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20% (SSGS, 2022). Berdasarkan hal tersebut permasalahan *Stunting* di Indonesia harus segera ditangani, sehingga program percepatan penurunan *Stunting* menjadi program prioritas nasional (Pro-PN).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan *Stunting*, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mempercepat penanganan *Stunting* khususnya pada wilayah Prioritas *Stunting*. Upaya tersebut mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara Konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya

Stunting, sedangkan Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya.

Dari upaya yang dilakukan tersebut, melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor di pusat, daerah, dan desa. Namun, berbagai upaya yang akan dilakukan tidak akan berhasil tanpa adanya keterlibatan semua sektor dan partisipasi masyarakat. Sebaran Prevalensi *Stunting* di Indonesia berdasarkan Provinsi seperti pada gambar dibawah ini;

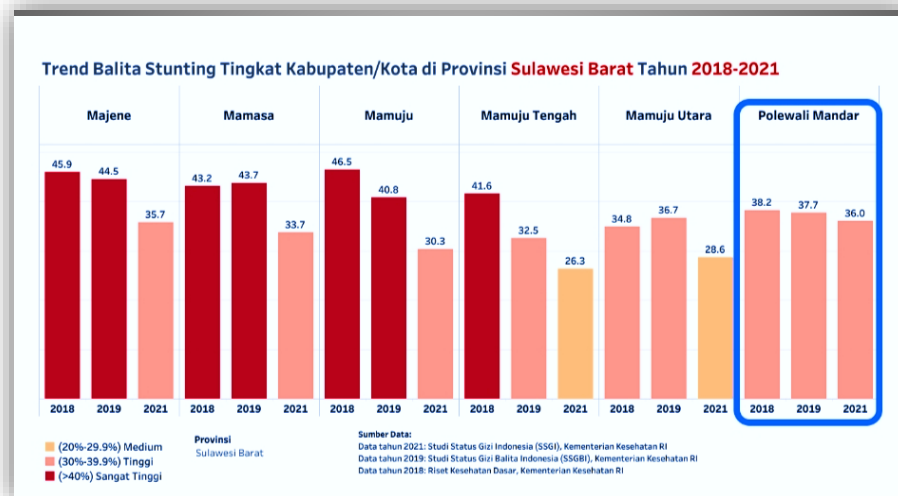
Gambar 1.1 Angka Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Provinsi



Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Kemenkes RI 2022

Berdasarkan dari gambar persebaran prevalensi *Stunting* di atas Provinsi, Sulawesi Barat merupakan Provinsi dengan prevalensi balita *Stunting* tertinggi kedua setelah NTT di Indonesia. Hal ini membuat Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang menjadi prioritas Percepatan Penurunan *Stunting*. Berikut ini akan disajikan persebaran data *Stunting* berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat yang terbagi kedalam 6 Kabupaten yaitu;

Gambar 1.2 Perevalensi Balita *Stunting* Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: databoks, Kementerian Kesehatan (kemenkes, 2022)

Dari data yang diperoleh tersebut dapat dilihat bahwa daerah Polewali Mandar, termasuk salah satu Kabupaten yang memiliki pravelensi *Stunting* tertinggi. Walaupun data tersebut menunjukkan penurunan dari tahun ketahun, kabupaten ini termasuk tertinggi pertama

di tahun 2021 dari 6 kabupaten dan diketahui tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 39,3%. Hal ini yang membuat kabupaten Polewali Mandar menjadi wilayah prioritas dalam penanganan *Stunting*.

Berdasarkan hal tersebut Bupati Polewali Mandar mengeluarkan aturan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar. Aturan ini dilatarbelakangi sebagai daerah prioritas *Stunting* dan membuat aturan terkait daerah yang menjadi lokus *Stunting*. Faktor penyebab tingginya *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar salah satunya dipengaruhi oleh faktor tingginya angka pernikahan dini dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *Stunting*.

Dalam melakukan aksi percepatan penurunan *Stunting* terdapat strategi yang harus dilakukan untuk mempercepat penurunan *stunting* khususnya di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokus *stunting*. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2022 yaitu Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Ditetapkannya aturan ini sebagai pedoman bagi Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes untuk melaksanakan pencegahan *Stunting* di tingkat Desa, melalui pelaksanaan program yang telah dirancang.

Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar, menargetkan angka *Stunting* di daerahnya bisa menurun sampai 15% pada 2024. Dia meminta bahwa Dana Desa dapat dioptimalkan sebagai salah satu strategi untuk menurunkan angka *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan lokus *Stunting* di desa sejak tahun 2021. Dari laman kemendagri.go.id tersebut diketahui terdapat beberapa daerah yang menjadi lokus *Stunting* termasuk Desa Duampanua Kecamatan Anreapi.

Tabel 1.1 Angka *Pravalensi Stunting* Kec. Anreapi

Data <i>Stunting</i> Kecamatan Anreapi		
Nama Desa	Jumlah <i>Stunting</i>	
	2021	2022
Anreapi	25	40
Kelapa Dua	52	56
Duampanua	67	102
Papandangan	32	23
Kunyi	25	27

Sumber: Dashboard Sebaran *Stunting*, E Monev Bangda 2021-2022

Dari data persebaran *Stunting* di desa duampanua terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yakni dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan peningkatan kasus balita *Stunting* baru semakin meningkat, Mardiaty selaku kader desa Duampanua mengatakan terdapat beberapa faktor penghambat adanya *Stunting* yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat

mengenai *Stunting*, kurangnya ibu membawa balitanya ke posyandu, kurangnya pemeriksaan ibu hamil ke faskes pada awal hamil, hal ini juga dipertegas bahwa jika selama tiga kali berturut-turut balita tidak ke posyandu maka itu sudah masuk rawan *Stunting* karena tidak dapat dikontrol lagi perkembangannya.

Faktor pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab tingginya *Stunting* karena ketidak sanggupannya orang tua untuk memenuhi asupan gizi balita menjadi penyebab kurangnya gizi pada balita yang berakibat pada *stunting*. Selain dari indikator tersebut masalah pemicu *stunting* di desa Duampanua yaitu berasal dari banyaknya jumlah usia muda dan usia tua yang melahirkan, dan jarak melahirkan yang terlalu dekat serta kurangnya partisipasi dari Ayah dari adanya paparan asap rokok bagi balita.

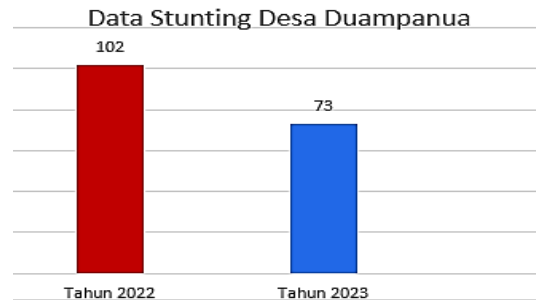
Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *stunting*, Kepala Desa menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* pada tingkat desa. Hal ini disusun oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah *Stunting* yang ada melalui berbagai rancangan program yang telah dirancang. Salah satu program yang baru-baru ini di laksanakan untuk menurunkan *Stunting* di Desa Duampanua yaitu Program Ma'silambi. Program ini merupakan program yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

sebagai salah satu upaya dalam penanganan *Stunting*, program ini ditetapkan pada 3 wilayah, yakni Kelurahan Baurung di Kabupaten Majene, Desa Duampanua, di Kabupaten Polewali Mandar, dan Desa Balla Satanetean di Kabupaten Mamasa.

Adanya program ini, Desa Duampanua menjadi salah satu model atau contoh dalam upaya penanganan *Stunting* sebagai salah satu desa lokus *stunting* yang memiliki *stunting* yang tinggi di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan dari adanya program ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai program yang ada di desa dalam penurunan *stunting*. Mereka yang terlibat dalam penanganan *Stunting* melalui program ini merupakan orang yang turut berperan untuk membuat masyarakat lebih aktif dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau program yang dilakukan di Desa. Hadirnya program ini menjadi salah satu wadah untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar menambah pemahaman masyarakat setempat terkait masalah *Stunting*.

Berdasarkan data di tahun 2023 sampai bulan September angka *stunting* mengalami penurunan dari tahun 2022-2023. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.3 Jumlah *Stunting* di Desa Duampanua



Sumber: Puskesmas Anreapi

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Duampanua tersebut, dari beberapa bulan telah dilaksanakannya program ini, dapat dilihat bahwa setelah setahun dilakukannya kolaborasi dan adanya beberapa program penunjang penanganan *stunting* di Desa Duampanua, Program Ma'silambi ini salah satu program yang dapat menurunkan angka *stunting* sebagaimana pada gambar 1.3. Namun upaya yang telah dilakukan diketahui bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang masih belum berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang ditandai dengan masih terdapat 45 balita yang belum ikut berpartisipasi dalam program penimbangan balita.

Untuk menekan prevalensi *stunting* tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan diperlukan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat, pemerintah desa, lembaga dan forum lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat mencapai target prevalensi *stunting* lebih rendah. Masyarakat dalam hal ini masih perlu diberikan pemahaman melalui

Penyuluhan sosial dan edukasi tentang bahaya *stunting* dan bagaimana upaya dalam pencegahannya. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan peran para penyuluh sosial dan semua elemen yang ikut berkolaborasi. Peran tersebut sebagai inisiator penggerak Masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di daerah tersebut.

Partisipasi dapat dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan. Keberhasilan Program ini akan terwujud jika terdapat partisipasi masyarakat yang baik dalam mengikuti setiap rangkaian program yang dilaksanakan dan adanya inisiasi penggerak dari kolaborasi yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam forum ma'silambi. Dengan adanya keberhasilan ini diharapkan akan mencapai *zero Stunting* di wilayah ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait partisipasi masyarakat dalam mencapai *zero Stunting* di Kelurahan Bulak Banteng oleh Deby Permatasari & Febriyan (2023:2637) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemauan, kemampuan serta kesempatan untuk mengikuti program/kegiatan dalam pengentasan *Stunting*. Namun masyarakat hanya sekedar mengikuti rangkaian kegiatannya tanpa menjalankan intervensi dari pihak pelaksana program. Diketahui dari faktor penghambatnya pekerjaan masyarakat sebagian besar buruh

kasar sehingga berpenghasilan rendah dan tidak mampu untuk memberikan makanan gizi seimbang, kurangnya pengetahuan orang tua pada pencegahan *Stunting* dan tingginya kepercayaan pada istiadat budaya masyarakat.

Dalam mengatasi masalah *Stunting* di Sulawesi Barat khususnya di desa Duampanua, melalui program Ma'silambi ini dilakukan dengan kolaborasi oleh beberapa pihak yang terlibat agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk lebih mengetahui penyebab dan penanganan *Stunting* untuk menuju *zero Stunting*. Berangkat dari hal tersebut Peneliti tertarik untuk melihat **Bagaimana Dinamika Kolaborasi dalam Penanganan *Stunting* Melalui Program Ma'silambi Di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar?**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Dinamika Kolaborasi dalam Penanganan *Stunting* Melalui Program Ma'silambi Di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Dinamika Kolaborasi yang dilakukan dalam Penanganan *Stunting* pada

Program Ma'silambi di Desa Duampanua sebagai lokus *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan referensi untuk pengembangan ilmu bagi civitas akademik maupun dari segi pengembangan ilmu kesehatan, pemerintahan dibidang kebijakan publik. Dan penelitian ini menjadi bahan ilmiah dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait mengkaji dan membahas pentingnya keterlibatan lintas sektor, masyarakat dan semua elemen dalam setiap pengambilan keputusan dalam menangani masalah khususnya permasalahan *stunting* saat ini.

2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dengan melihat fenomena masalah yang ada. Adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada seluruh *stakeholder* yang terkait, khususnya bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa dan semua elemen yang berkolaborasi khususnya pada Pelaksana Program untuk menangani percepatan penurunan *stunting*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Governance*

Istilah “*governance*” sebagai bentuk kata ganti dari “*government*”, tetapi perlu dipahami bahwa “*governance*” bukanlah sinonim dari “*government*”. *Governance* memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2018 dalam Astuti et al., 2020:32). Senada dengan pendapat Ganiie-Rocchman dalam Maksudi (2019:329), bahwa *governance* tidak sekadar pemerintah dan negara, namun pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Governance ini diartikan sebagai pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. *Governance* didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan kekuasaan atau otoritas yang dilakukan oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarkan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta

berpengaruh pada pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014 dalam Astuti et al., 2020:25). Hal tersebut sesuai dengan pendapat World Bank dalam (Maksudi, 2019:330) mengatakan kata *governance* lebih menekankan pada cara bagaimana kekuasaan negara/pemerintah digunakan untuk mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, *governance* hadir menjadi paradigma baru dalam administrasi publik sebagai pola bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik untuk tidak mendominasi karena beban negara yang semakin banyak dan berat dalam mengatasi berbagai masalah yang kompleks sehingga diperlukan keterlibatan swasta dan masyarakat.

2.2 Collaborative Governance

2.2.1. Definisi Collaborative

Makna dari kolaborasi awalnya diambil dari kata *co* dan *labor* yang diartikan sebagai penggabungan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama. Biasanya kolaborasi digunakan untuk menjelaskan pekerjaan antar lintas sektor atau lintas hubungan yang diartikan sebagai kerjasama antar beberapa aktor, organisasi dan lembaga yang memiliki tujuan yang sama dalam mengatasi suatu

masalah Udani (2016:24). Kolaborasi merupakan suatu kegiatan yang terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul komunikasi para pemangku kepentingan dalam mengatasi dan memecahkan masalah.

Menurut Sudarmo dalam (Astuti et all. 2020:42) mengatakan kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh pendapat Bardach ia mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan “*public value*” ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Berdasarkan dari penjabaran diatas, juga sejalan dengan pendapat Charles H. Chooley dalam (Soekanto,2015:66) mengatakan kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kepentingan tersebut, kesadaran adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam kerja sama.

Thomas dan Perry (2007:20-32) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses dimana para aktor otonom berinteraksi melalui negosiasi format maupun informal yang secara bersama-sama menyusun aturan yang mengatur hubungan mereka dan cara untuk memutuskan dan mengatasi masalah yang mendorong mereka untuk bekerja sama. Adanya kemauan dalam berkolaborasi didasarkan adanya kemauan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama dan masalah ini akan lebih mudah diatasi jika dilakukan dengan bersama.

Dari beberapa pengertian yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi adalah bentuk kerjasama antar individu maupun kelompok atau organisasi untuk saling berinteraksi dan saling bertukar informasi baik dari segi sumber daya, tanggung jawab, dan manfaat. Untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menyelesaikan persoalan, yang menjadi domain dari adanya kerjasama yang dilakukan yaitu adanya keterkaitan antarsektor. Adanya kolaborasi yang dilakukan diharapkan dapat membangun kepercayaan dan kebersamaan, tanggung jawab dalam menghadapi masalah dalam segala situasi yang dialami.

2.2.2. Definisi *Colaborative Governance*

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung yang berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik yang akan dilakukan (Ansell dan Gash, 2008:544)

Kolaborasi antara institusi pemerintah (internal) dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan sangatlah penting sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pelaksanaan program tidak dapat diselesaikan dan dijalankan tanpa melibatkan beberapa pihak dalam mensukseskannya. Dalam kerjasama yang dilakukan, terdapat pembagian kerja dan koordinasi untuk mempermudah pelaksanaan program tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya keterlibatan pemerintah dengan pembagian kerja kedalam departemen-departemen yang fokus terhadap satu sektor, tetapi ada pula instansi pemerintah yang menangani pelayanan publik secara bersama-sama (lintas sektor) dikarenakan diperlukannya keterlibatan antar instansi dan keterlibatan pihak penerima layanan yaitu masyarakat.

2.2.3. Teori *Collaborative Governance*

Teori kolaborasi merupakan suatu analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya untuk menuntaskan suatu persoalan (Booher dan Innes, 2002:221-236).

Model *collaborative governance* muncul sebagai respons terhadap masalah publik yang ada, sehingga dibutuhkan berbagai aktor (multi-aktor) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya, *collaborative governance* dipahami sebagai upaya untuk mengefektifkan manajemen publik melalui keterlibatan lintas aktor dalam konteks *governance*. (Astuti et al., 2020:72). Berikut beberapa model prinsip *collaborative governance* yaitu:

1. Teori Kolaborasi Vigoda (2002)

Menurut Vigoda proses kolaborasi dapat dilihat melalui enam tahapan yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum kolaborasi yang akan dilakukan, tahapan tersebut yaitu;

1) Memutuskan Isu

Memutuskan isu di dalam kolaborasi ini dilakukan untuk membuktikan kolaborasi tersebut baik atau buruk bagi anggotanya.

Hal ini dapat dibuktikan melalui dua kondisi yaitu (1) masalah,

diusahakan menjadi sebuah investasi bersama dengan membuat sebuah kelompok kerja bersama, (2) terdapat alasan yang jelas agar dapat dipercaya. Pemangku kepentingan yang akan hadir akan memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar dalam kelompok.

2) Menentukan Karakteristik Masalah

Menentukan karakteristik masalah dapat dimulai dengan sebuah pertanyaan “apa dan dimana” masalah tersebut. Kolaborasi membutuhkan kejelasan apa yang menjadi isu dan dimana dibutuhkan tindakan, dalam hal ini setiap anggota adalah individu yang memiliki kompetensi untuk bernegosiasi terhadap masalah dan mampu saling bertukar gagasan untuk bekerja sama demi menghasilkan kolaborasi yang efektif dan efisien.

3) Mencari tau siapa saja yang terlibat

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi memiliki tujuan yang sama untuk saling meningkatkan komitmen, kepercayaan, dan keyakinan dalam perencanaan tujuan bersama.

4) Mencari tau bagaimana mengimplementasikannya

Terwujudnya kolaborasi yang efektif dapat dipengaruhi oleh kedewasaan berkomunikasi, kerja sama, ketulusan, keiklasan, dan fleksibilitas.

5) Mencari tau bagaimana menyelenggarakannya

- a) Para pemangku kepentingan sepakat secara bersama-sama melakukan program tersebut dengan metode yang sudah ditentukan bersama
- b) memikirkan kembali dan mendefinisikan tujuan
- c) Menentukan indikator-indikator kerja untuk seluruh proses kolaborasi.

6) Mencari tau bagaimana mengevaluasi prosesnya

Melalui evaluasi akan terlihat dampak dari upaya yang telah dilakukan dari proses kolaborasi, seperti; menilai dampak dan perubahan bagi organisasi tersebut, bagi anggota organisasi dan bagi masyarakat yang mereka layani.

2. Teori Kolaborasi Seigler (2011)

Daniel Seigler menyampaikan bahwa terdapat delapan prinsip utama dalam penerapan *collaborative governance* yakni:

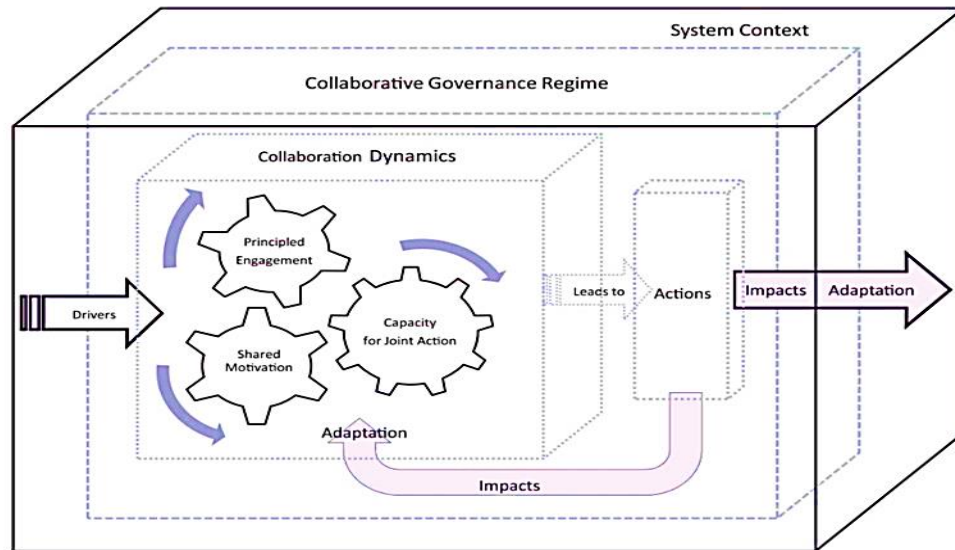
- a. Warga masyarakat harus dilibatkan dalam produksi barang publik;
- b. Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan asset untuk memecahkan masalah publik;
- c. Tenaga profesional harus dilibatkan untuk memberdayakan warga masyarakat;
- d. Pengambilan kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan;

- e. Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan;
- f. Kebijakan harus strategis;
- g. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk memberdayakan masyarakat dan pemecahan masalah publik; dan
- h. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.

3. Teori Kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Model *Collaborative governance regime* (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, et al. (2012) menjelaskan bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus dan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum menuju kepada dampak utama dan adaptasi terhadap dampak sementara. Komponen yang menjadi proses kolaborasi yakni *collaborative dynamics*, dan *impacts and adaptation*.

Gambar 2.1
Kerangka Kerja Integrative Tata Kelola Kolaboratif



Sumber: Emerson, Nabatchi, and Balogh, 2012, halaman 6

Dalam kerangka ini, *Collaborative Governance Regime* (CGR) digambarkan dalam kotak tengah dengan garis putus-putus dan memuat dinamika kolaboratif dan tindakan kolaboratif. Dinamika dan tindakan kolaboratif ini membentuk keseluruhan kualitas dan sejauh mana CGR dikembangkan dapat bersifat efektif.

Dinamika kolaboratif, yang diwakili oleh kotak paling dalam dengan garis putus-putus, terdiri dari tiga komponen interaktif yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama. Ketiga komponen dinamika kolaboratif tersebut bekerja sama secara interaktif dan berulang untuk menghasilkan

tindakan kolaboratif atau langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengimplementasikan tujuan bersama. Tindakan CGR dapat memberikan hasil baik di dalam maupun di luar rezim; dengan demikian, pada gambar, anak panah memanjang dari kotak tindakan untuk menunjukkan dampak (yaitu hasil di lapangan) dan potensi adaptasi (transformasi situasi atau isu yang kompleks) baik dalam konteks system maupun CGR itu sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan *system context* yang direpresentasikan dalam kerangka ini, bukan sebagai serangkaian kondisi awal namun sebagai ruang tiga dimensi yang melingkupinya karena kondisi eksternal (misalnya pemilu, penurunan ekonomi, peristiwa cuaca ekstrem, atau peraturan yang baru diberlakukan) dapat mempengaruhi dinamika dan kinerja kolaborasi tidak hanya di awal namun kapan saja selama berlangsungnya CGR, sehingga membuka kemungkinan-kemungkinan baru atau menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak diantisipasi.

Driver yang dimaksud dari gambar tersebut merupakan fasilitator dalam hal ini kepemimpinan atau aktor yang menjadi domain dalam pelaksanaan kolaborasi. Semakin banyak pengemudi yang hadir dan dikenali oleh peserta, maka semakin besar kemungkinan CGR akan dimulai.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kerangka integratif ini memperkenalkan istilah CGR, yang menunjukkan suatu sistem di mana kolaborasi lintas batas mewakili cara utama dalam melakukan, pengambilan keputusan, dan aktivitas. Bentuk dan arah CGR pada awalnya dibentuk oleh faktor-faktor pendorong yang muncul dari konteks sistem. Namun, efektifnya pelaksanaan dari *collaborative governance regime*, dipengaruhi dari waktu ke waktu oleh dua komponen yaitu dinamika kolaboratif dan tindakan kolaboratif. Di bawah ini, akan dijelaskan kedua komponen tersebut, serta berbagai elemen yang ada di dalamnya.

1) Dinamika Kolaborasi (*Collaborative Dynamics*)

Dinamika kolaborasi merupakan hal paling penting dalam proses kolaborasi. Emerson, dkk. (2012) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif dengan berfokus pada tiga komponen yakni prinsip keterlibatan (*Principled Engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

a) Prinsip Keterlibatan (*Principled Engagement*)

Prinsip keterlibatan dilakukan untuk menyatukan prinsip bersama yang merupakan inti dari kolaborasi ini, melalui dialog tatap-muka atau melalui perantara teknologi merupakan cara untuk menggerakkan prinsip bersama. Penegasan kembali apa yang

menjadi tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama dari aktor yang terlibat. Dalam penggerakan prinsip bersama, terdapat komponen yakni

- Pengungkapan yakni proses mengungkap kepentingan, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan ini dapat dianalisis dari mengapa aktor tersebut bergabung ke dalam kolaborasi.
- Deliberasi yakni adanya diskusi bersama, keterbukaan berpendapat, menyatakan ketidaksetujuan, diskresi sehingga membentuk “kualitas deliberasi”. Terdapat dorongan untuk mengemukakan pendapat dan masing-masing mempresentasikan pencapaian kegiatan yang telah dilakukan.
- Determinasi yakni serangkaian tindakan penetapan bersama akan tujuan kolaborasi. Determinasi terdapat dua jenis, yaitu primer dan substantif. Determinasi primer lebih kepada pembuatan keputusan prosedural, (teknis kolaborasi, penetapan agenda, jadwal pertemuan, kelompok kerja). Sedangkan determinasi substantif lebih kepada pembentukan kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi ke depan.

b) Motivasi bersama (*shared motivation*)

Motivasi bersama menekankan pada elemen terpersonal dan relasional dari dinamika kolaborasi. Kekuatan yang mendorong individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, melalui kepercayaan bersama, pemahaman bersama legitimasi dan komitmen untuk menciptakan sinergi dan memperkuat semangat kolaboratif. Adapun elemen dari motivasi bersama yaitu:

- Kepercayaan bersama yakni diperlukan usaha terus-menerus dari interaksi untuk mengetahui satu sama lain dan membuktikan kelayakan untuk dipercaya. Hubungan saling tergantung, hubungan antar aktor di luar kolaborasi, pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor lain, adanya hubungan individu pada antar aktor mempengaruhi hubungan kepercayaan dengan aktor lain.
- Pemahaman bersama artinya sesama aktor saling mengerti dan menghargai perbedaan.
- Legitimasi internal yakni adanya pengakuan berasal dari internal kolaborasi, yaitu bahwa aktor-aktor kolaborasi dapat dipercaya atau kredibel dalam menjalankan tugas dan perannya.

c) Kapasitas melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*)

Kolaborasi ada karena masalah tidak dapat diselesaikan secara individu atau satu aktor saja. Oleh karenanya, dalam teori CGR menekankan harus menghasilkan kapasitas bagi masing-masing aktor untuk bertindak bersama. Definisi kapasitas sendiri menurut Emerson et al. (2012:14) yakni “*a collection of cross-functional elements that come together to create the potential for taking efektif action*” atau hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif dikarenakan adanya kapasitas yang dimiliki dari masing-masing aktor. Dalam hal ini, kapasitas melakukan tindakan bersama dikonseptualisasikan dalam kerangka dari kombinasi beberapa elemen penting yakni:

- Kepemimpinan yakni pemimpin kolaborasi dalam menjalankan perannya dengan baik. Peran pemimpin selama proses kolaborasi di antaranya sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, inisiasi pertemuan, fasilitator dan mediator, representasi dari aktor, sharing pengetahuan, dan melakukan advokasi kepada publik terkait fungsi dan peran yang dimiliki.
- Pengetahuan yakni pemahaman akan informasi untuk menambah kapabilitas yang membawa pada tindakan, dan bagaimana mendistribusikan pengetahuan dan para aktor

memanfaatkannya dalam proses kolaborasi melalui tindakan aktor.

- Sumber daya yakni dalam kolaborasi terjadi pertukaran maupun penggabungan sumber daya seperti pendanaan finansial, pembagian waktu dan peran, dukungan teknis, saling melakukan pendampingan, dan kebutuhan ahli dan sebagainya. Pada dasarnya kapasitas untuk melakukan tindakan bersama menjadi tantangan utama dan krusial dalam proses kolaborasi. Adanya perbedaan karakteristik dan kekuatan antar aktor, oleh karenanya kejelasan prosedur dan kesepakatan bersama yang dituang dalam legal-formal, kepemimpinan, manajemen pengetahuan, dan manajemen sumber daya menjadi penting dalam kolaborasi.

2) Tindakan-tindakan dalam Kolaborasi (*Actions*)

Tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *collaborative governance*. Innes dan Booher dalam Emerson (2012:17) tindakan-tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini didasarkan bahwa proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri.

3) Dampak dan adaptasi (*impacts and adaptation*)

Dampak yang dimaksud dalam teori ini yakni dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak yakni ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan misalnya hasil-hasil positif yang terus berlangsung, sementara dampak tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi, serta dampak tidak terduga yakni muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

2.3 Konsep *Stunting*

2.3.1. Definisi *Stunting*

World Organization Health (WHO) mendefinisikan *Stunting* sebagai suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat adanya infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Dalam kehidupan seorang anak didasarkan pada panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dengan batas kurang dari -2 standar deviasi (SD). (WHO, 2010). Menurut Kemenkes *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat adanya kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Sedangkan menurut BKKBN *Stunting* merupakan kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang berlangsung

lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. (BKKBN 2021).

Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*grow faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Periode 0-24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan yang biasa disebut dengan periode emas. Hal tersebut merupakan periode sensitive yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan balita karena akibat yang ditimbulkan terhadap perkembangan balita pada periode tersebut akan bersifat permanen. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat (Mitra, 2015:254) yang mengatakan bahwa *Stunting* adalah kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung mulai dari kehamilan hingga usia 24 bulan.

2.3.2. Penyebab *Stunting*

Faktor utama yang menyebabkan *Stunting* adalah kurangnya nutrisi, sehingga dapat dikatakan bahwa tubuh yang pendek adalah ciri-ciri dari anak kekurangan gizi. Banyak orang awam yang memahami bahwa faktor genetik menjadi penyebab anak *Stunting*, padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan (Toliu, dkk 2018: 1-5) menganalisis bahwa faktor genetik tidak terlalu memengaruhi *Stunting* pada anak, namun hanya sedikit sekali memengaruhi terjadinya

Stunting. Hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapat hubungan antara tinggi badan ayah dengan kejadian *Stunting* dan hanya sedikit berpengaruh pada tinggi badan ibu, faktor lingkungan yang lebih

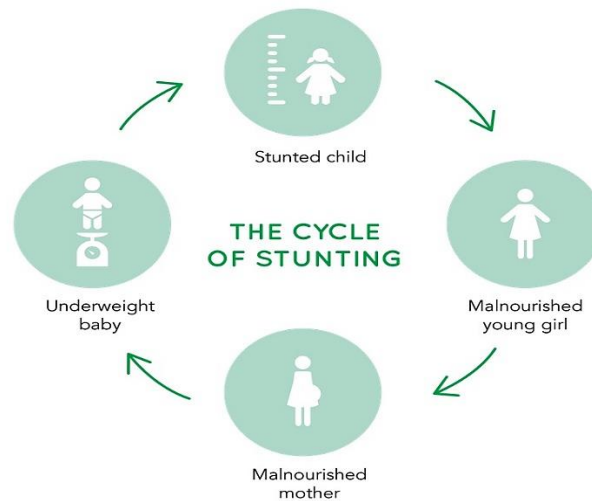
Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi yang tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan balita namun juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti;

- 1) Praktek pengasuhan yang kurang baik. Hal ini berawal dari kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan.
- 2) Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante *Natal Care* (Pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) *Post natal care* dan pembelajaran dini yang berkualitas.
- 3) Kurangnya akses rumah tangga/keluarga pada makanan yang bergizi, yang disebabkan oleh kurangnya ekonomi dan pengetahuan akan manfaat dan nilai gizi pada makanan yang dikonsumsi.
- 4) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang baik. (Kemiskinan 2017 dalam Saputri & Tumangger 2019:4).

2.3.3. Proses Terjadinya *Stunting*

Siklus *Stunting* adalah siklus pertumbuhan pada manusia sepanjang hayat yang dimulai sejak anak itu lahir kemudian masuk usia remaja, usia subur, hamil, menyusui, dan lansia. Seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.2 Siklus *Stunting*



Sumber: <https://go.co/about/xzrd89>

Gambar diatas menunjukkan siklus *stunting* yang saling terkait satu sama lain. Pada dasarnya tidak hanya saat usia balita *stunting* dapat terjadi, tapi bisa terjadi mulai saat usia remaja hingga melahirkan. Ketika setiap dari siklus tersebut tidak dijalankan dengan baik dengan menjalani pola hidup sehat maka akan menjadi salah satu pemicu lahirnya *stunting*.

Ada tingkatan *stunting* pada anak mulai dari rendah sampai tinggi mulai dari yang pendek sampai sangat pendek yang diukur dari status gizi yang didasarkan pada indeks *PB/U* atau *TB/U* dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, yang hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (*Z-Score*) $\leq 2 SD$ sampai dengan $-3 SD$ (pendek/*stunted*) dan $\leq 3 SD$ (sangat pendek/*severely stunted*).

Penyebab *stunting* tidak memiliki tingkatan tapi dipengaruhi oleh 4 masalah gizi yang menjadi penyebab adanya *stunting* yakni *weight faltering*, *underweight*, gizi kurang dan gizi buruk. Setelah keempat masalah tersebut teratasi maka penurunan prevalensi *stunting* akan terjadi.

Menurut Dirjen Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi 2023 mengatakan kalau ingin menurunkan *stunting* maka harus menurunkan masalah gizi sebelumnya yaitu *weight faltering*, *underweight*, gizi kurang dan gizi buruk, jika keempat masalah gizi ini tidak turun maka *stunting* akan susah turun. Berikut disajikan gambar proses *stunting* dan pencegahannya yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.3 Proses dan Pencegahan *Stunting*



Sumber: Kementerian Kesehatan 2021

Dari gambar diatas pencegahan yang dilakukan hanya pada intervensi spesifik atau langsung yang biasanya diberikan oleh pemerintah kesehatan bukan intervensi sensitive atau tidak langsung. Adapun pencegahan intervensi tidak langsung dapat di lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2. Memberikan penyuluhan untuk tetap mengikuti akses layanan kesehatan khususnya pelayanan di Posyandu agar peninjauan status kesehatan dapat dipantau untuk menghindari terjadinya KEK (kekurangan gizi kronik) pada ibu hamil dan bayi.
3. Perbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan

4. Perbaiki pola asuh keluarga dalam pemenuhan makanan dan perawatan kesehatan
5. Memberikan pemahaman mengenai *stunting* bukan hanya pada ukuran tinggi badan tapi konsep proses terjadinya pemicu *stunting* mulai dari remaja hingga melahirkan.
6. Sosialisasi terkait MP-ASI terutama mengenai bahan makanan dengan gizi yang baik.

2.3.4 Percepatan Penurunan *Stunting*

Dalam rangka mewujudkan Sumber daya manusia yang unggul, masalah *Stunting* menjadi penghambat peningkatan kualitas SDM yang ada khususnya di Indonesia. Hal ini di tandai dengan adanya percepatan penurunan *Stunting* sebagai salah satu program prioritas Presiden Nomor 72 tahun 2021. Aturan ini sebagai alternative dalam menurunkan angka *Stunting* di Indonesia yang tingginya.

Tujuan dari adanya percepatan penurunan *Stunting* ini sebagai salah satu target *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Adapun target yang ingin dicapai sebagai ditetapkan dalam menurunkan angka *Stunting* yaitu

hingga 40% pada tahun 2025. Hal ini menjadi program prioritas karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia kedepannya.

Disamping itu, wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan *Stunting*, hal ini ditandai dengan prevalensi *Stunting* yang masih tinggi di wilayah ini. Sehingga membuat penanganan *Stunting* di Sulawesi Barat merancang berbagai aspek melalui kerjasama dalam pelaksanaan program sebagai alternative dalam percepatan penurunan *Stunting*, terutama pada daerah yang memiliki angka *Stunting* yang tinggi.

2.4 Kebijakan Penanganan *Stunting* di Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang mandat dan kewenangan desa berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya kewenangan yang diberikan oleh kepala desa, merupakan mandat untuk mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal, desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik seperti kesehatan dan

pendidikan yang berskala desa melalui sinergitas dengan sektor penyedia layanan.

Penanganan *Stunting* merupakan prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu Indikator Output dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019. Upaya penanganan *Stunting* sudah menjadi prioritas nasional, sehingga desa sangat memungkinkan untuk menyusun kegiatan penanganan *stunting* berskala desa. Adanya Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, desa dapat memanfaatkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan melalui perencanaan desa.

Rujukan belanja desa dalam penanganan *stunting* diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Adapun aturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa adalah Pencegahan *Stunting* untuk mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera.

Contoh kegiatan penanganan *stunting* di desa adalah pembangunan/rehabilitasi Poskesdas atau Polindes dan Posyandu, Konseling dan penyediaan makanan tambahan yang sehat untuk ibu hamil, balita dan ibu menyusui, pembangunan sanitasi dan air bersih, Pembangunan MCK, Pelatihan dan Pembinaan Kader Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak pelaksanaan program yang dirancang dan pendanaan dalam menangani *Stunting* yang telah disiapkan oleh pemerintah Desa dan pemerintah lainnya untuk menuju *zero Stunting*.

2.5 Program Ma'Silambi

Program merupakan Kombinasi antara kebijaksanaan, prosedur dan aturan, serta pemberian tugas yang diikuti dengan suatu anggaran yang menciptakan adanya suatu tindakan. Dalam program umumnya, meliputi keseluruhan tindakan yang akan dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat. Program khusus, mencakup kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. (Effendi, 2019:91)

Program Ma'silambi merupakan salah satu program yang dilakukan dalam percepatan penanganan *Stunting*, program ini dilakukan sebagaimana intruksi Presiden dalam percepatan penurunan *Stunting* sehingga Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu wilayah yang prioritas dengan angka *Stunting* tertinggi merancang program ini sebagai

salah satu alternative untuk menurunkan angka *Stunting* di beberapa Kabupaten. Ma'silambi adalah singkatan dari "Merdeka Ancaman *Stunting* Baru dengan Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi". Menurut Asran, dalam Bahasa Mamasa Ma'silambi berarti bertemu. Sehingga dapat dimaknai sebagai pertemuan beberapa pihak dalam menuntaskan *Stunting* baru dengan semangat kolaboratif, sebagaimana makna sebelumnya.

Ma'silambi merupakan hasil dari pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II angkatan X P2KP LAN Makassar pada tahun 2022 yang kini diadopsi dan dijadikan sebagai strategi penanganan *Stunting* di Sulawesi Barat. Adapun *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program ini yaitu diantaranya; Kadis Kesehatan, Kabid Kesmas, dan Camat Anreapi yang berperan untuk memberikan arahan dan pendampingan. Kepala Desa Duampanua sebagai Ketua yang berperan untuk mengkoordinir, memberikan petunjuk dan koordinasi dengan Puskesmas Anreapi. Anggota PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, kader kesehatan, tokoh pemuda, Bhabinsa, Bhabinkabtibmas, Karang Taruna dan tokoh perempuan sebagai anggota dalam forum yang berperan menganalisis pemetaan data ibu hamil dan anak balita, melaksanakan program kerja, menyusun laporan rutin pelaksanaan kegiatan forum, dan melakukan monitoring dan evaluasi.

Program tersebut merupakan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu yang bertujuan untuk memastikan setiap balita diberikan perhatian khusus terkait pertumbuhan dan perkembangannya. Program ini dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu upaya terobosan yang terstruktur, sistematis dan massif untuk menekan angka *Stunting* di Sulawesi Barat khususnya pada daerah-daerah yang memiliki angka *Stunting* yang tinggi. (Kepala Dinkes Sulbar).

Program Ma'silambi merupakan program yang melibatkan semua pihak di masyarakat, karena tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Pemerintah saja tapi harus berkolaborasi dengan beberapa lintas sektor yang ada. Dalam upaya penanganan *Stunting*, program Ma'silambi ini ditetapkan pada 3 wilayah, yakni Kelurahan Baurung di Kabupaten Majene, Desa Duampanua di Kabupaten Polewali Mandar, dan Desa Balla Satanetean di Kabupaten Mamasa. Ketiga wilayah ini merupakan masing-masing wilayah dari Kabupaten Sulawesi Barat yang memiliki *Stunting* tinggi sebagai daerah percontohan untuk pelaksanaan program ini.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menyediakan kerangka referensi dan menggambarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bidang yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, adanya penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk membangun dasar teoritis atau konsep yang kuat melalui identifikasi penelitian yang sudah ada, serta menunjukkan relevansi penelitian yang akan dilakukan.

Adanya penelitian terdahulu, peneliti dapat menghindari duplikasi penelitian yang sudah ada dan memperlihatkan perbedaan atau pembaruan dari penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yuni Kurniasi Sri Suwitri dan Septiana Wulan (2023)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Temanggung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>collaboration governance</i> dalam percepatan pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik dan efektif, di mana hasil sementara yang didapatkan terjadi penurunan angka <i>Stunting</i> pada hasil	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokus penelitian, dan variable yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan indikator dari Middle teori Ansel & Gash dan menggunakan teori Emerson, Nabagci dan Balogh yaitu kondisi awal, desain kelembagaan,

			penimbangan serentak bulaan februari 2022 yaitu sebanyak 2,9 % dan komitmen antar anggota konvergensi.	kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Sedangkan penelitian yang diteliti fokus pada variable <i>Collaborative Dynamics</i> , dari tahapan kolaborasi oleh Emerson Nabatchi dan Balogh.
2.	Afra Abida Edlina (2023)	Peran Badan Perencanaan Pembangunan dalam Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Muara Enim	Temuan Penelitian menunjukkan bahwa Bappeda sebagai <i>leasing sector</i> telah berperan dalam mengikuti anjuran dari Bagda Kemendagri dalam pelaksanaan Koordinasi 8 aksi Konvergensi. Komunikasi dan koordinasi telah dilakukan bersama dengan OPD yang terlibat melalui Website dan pertemuan tatap muka dari tingkat desa sampai provinsi. Dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa masih terdapat kendala diantaranya; Ego Sektoral, Kebijakan Kepala desa, dan pengimputan data yang tidak tepat waktu pada website Bangda.	Penelitian ini fokus pada Koordinasi yang dilakukan Oleh Bappeda sebagai <i>leading sector</i> dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dikumentasi dan menggunakan pendekatan teori Hasibuan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada <i>collaborative</i> yang dilakukan dalam pelaksanaan Program pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentas dengan pendekatan proses kolaborasi oleh Emerson Nabatchi dan Balogh yakni <i>Collaborative Dynamics</i> .
3.	Muhammad Zulkiflis (2020)	Penanggulangan angka <i>Stunting</i> di Dinas Kesehatan	Hasil penelitian yang dilakukan di Enrekang dalam penanggulangan angka <i>Stunting</i> dengan menggunakan 3 indikator	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada Penanggulangan <i>Stunting</i> di Dinas Kesehatan, sedangkan penelitian ini

		Kabupaten Enrekang	diantaranya sosialisasi, pencegahan dan mengantisipasi berjalan dengan baik.	lebih berfokus pada proses dan pengaruh kolaborasi pihak yang terlibat dalam penanggulangan <i>Stunting</i> .
4.	Ipan, Hanny Purnama sari, dan Evi Priyanti (2021)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan <i>Stunting</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan <i>Stunting</i> berjalan dengan cukup baik. Hal itu ditandai dengan adanya penurunan jumlah <i>Stunting</i> di wilayah UPTD Puskesmas Ciampel	Peneliti terdahulu melakukan analisis data dengan menggunakan teori <i>collaborative governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) yang berfokus pada proses kolaborasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori Emerson Nabatchi, dan Balogh yang berfokus pada indikator yakni <i>Collaborative Dynamics</i> .
5.	Nurbudiwati, Ikeu Kania, Rd Ade Purnawan, Idham Mufti (2020)	Partisipasi Masyarakat dalam Percepatan <i>Stunting</i> di Kabupaten Garut	Penelitian ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan <i>Stunting</i> menjadi salah satu penyebab tingginya angka <i>Stunting</i> di Desa Leuwigoong, yang ditandai dengan kurangnya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, kesibukan orangtua, kemiskinan. Rendahnya partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya hambatan dari dalam dan luar yaitu umur, jenis kelamin, pengetahuan, dan penghasilan dan pekerjaan. Sedangkan	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dengan menggunakan indikator dari segi faktor penghambat dan pendorongnya sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kolaborasi dalam pelaksanaan programnya dengan indikator <i>collaboration governance</i> , dengan melihat dinamika kolaborasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program.

			<p>hambatan dari luar dipenagruhi oleh kurangnya koordinasi dengan lintas sektor. Walaupun angka <i>Stunting</i> di desa ini tinggi, akan tetapi setiap tahunnya terjadi penurunan hal ini terjadi karena adanya faktor pendukung dari segi adanya kemamuan untuk berpartisipasi, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi</p>	
--	--	--	---	--

2.7 Kerangka Pikir

Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada proses kolaborasi terhadap *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program Ma'silambi dalam percepatan penurunan *Stunting* khususnya dalam penanganan *Stunting* di Desa Duampanua yang menjadi lokus desa sebagai percontohan pelaksanaan program penurunan *Stunting* yang ditandai sebagai salah satu Desa di Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki angka *Stunting* yang tinggi.

Penelitian ini mengambil teori *collaborative governace* oleh Emerson, et al (2012). Hal ini dikarenakan teori ini lebih relevan untuk mendeskripsikan proses kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder* terhadap permasalahan yang terjadi sesuai dengan tema peneliti,

sedangkan teori kolaborasi yang lain kurang relevan untuk mendeskripsikan proses kolaborasi yang terjadi.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk mendeskripsikan bagaimana proses *collaborative governance* dari segi dinamika kolaborasinya dalam pelaksanaan program Ma'silambi. Adapaun indikator yang akan digunakan sebagai acuan dalam teori Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012:11) berfokus hanya pada indikator *Collaborative Dynamics* (Dinamika kolaborasi), yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

Alasan peneliti hanya memilih indikator ini karena berdasarkan dilapangan indikator ini lebih relevan untuk digunakan, sedangkan untuk indikator yang lain belum dapat di analisis. Hal tersebut juga ditandai dengan pelaksanaan program ini yang baru terlaksana di bulan September tahun 2022, artinya program ini baru dilaksanakn setahun. Sehingga hal ini yang membuat kedua indikator ini belum relevan dengan penelitian. Oleh karena itu, peneliti lebih tertarik untuk melihat bagaimana dinamika program yang dilakukan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan, dan melihat pengaruh *stakeholder* yang terlibat dalam mempengaruhi tokoh masyarakat untuk terlibat dalam program.

Kerangka Pikir



Gambar Kerangka Pikir 2.4